BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas, mencapai 8,3 juta km², dengan luas daratan sebesar 1.916.906,77 km² dan perairan seluas 3.110.000 km² yang terdiri dari 16.766 pulau (BPS, 2021). Negara ini memiliki batas laut dengan 10 negara tetangga dan berbatasan darat dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste.(Departemen ESDM). Sistem pertahanan yang kuat diperlukan buat melindungi kedaulatan negara.

Pengembangan industri pertahanan diatur dalam Pasal 3, yang menekankan kemandirian peralatan pertahanan buat mendukung kekuatan keamanan yang andal. UU No. 3 Tahun 2002 memberi tahu jika pertahanan negara bertujuan melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman (PP RI, 2002). Pemerintah Indonesia mengelola pertahanan melalui kebijakan Minimum Essential Force(MEF) yang diatur dalam RPJMN 2010- 2014(Perpres No. 5 Tahun 2010) MEF menetapkan jumlah dan kapasitas minimal alutsista buat hadapi ancaman nyata, sekaligus memantapkan komponen Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia(TNI) sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional (PP RI, 2010).

Implementasi MEF dicoba dalam 3 Rencana Strategis(Renstra), yakni Renstra 1: 2010- 2014, Renstra 2: 2015- 2019, dan Renstra 3: 2020- 2024 (Review, 2018) Dalam upaya mewujudkan strategi pertahanan, Indonesia telah menjalankan diplomasi pertahanan bilateral selama beberapa dekade dengan menjalin kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan(Gindarsah, 2016).

Diplomasi ini bertujuan buat menguatkan kerja sama internasional lewat bermacam perjanjian, tercantum di zona pertahanan. Sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang- Undang Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NKRI Tahun 1945), salah satu tujuan Pemerintah Indonesia merupakan berpartisipasi dalam kerja sama pertahanan internasional. Untuk mendukung hal ini, Indonesia terus melakukan transformasi militer dan modernisasi perlengkapan utama sistem persenjataan (alutsista).

Negara ini telah membuat alutsista secara mandiri, seperti kendaraan Maung PT Pindad, Panser Anoa, Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV), dan Pesawat CN325. Pengembangan pesawat jet tempur KF- 21 Boramae, yang dimulai pada tahun 2014, telah dimulai dan diharapkan selesai dalam 12 tahun pada tahun 2026.

Dalam kesepakatan, kedua negara setuju untuk membuat jet tempur senilai 8,1 triliun won atau sekitar Rp100 triliun; Indonesia akan memberikan 20% dari biaya. Indonesia berkomitmen membayar Korea Selatan sekitar Rp2 triliun setiap tahun untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, perubahan politik Korea Selatan memperlambat proyek dan pembayaran. Pada 2018, Indonesia berusaha untuk renegosiasi tentang kesepakatan ini untuk mengurangi tekanan pada cadangan devisa mereka.

Pemerintah Indonesia menawarkan skema barter proyek sebagai alternatif pembayaran. Ini termasuk pembangunan smart city di Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek pengembangan mobil listrik. Pemerintah Korea Selatan, bagaimanapun, terus meminta Indonesia melunasi tunggakan pembayaran terlebih dahulu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain pembelian jet tempur, program kerja sama tersebut juga mencakup investasi dalam alutsista domestik, produksi komponen untuk pesanan KFX/IFX dari berbagai negara, dan memberikan insentif ekonomi.

Pada 2019, Indonesia sempat menghentikan pendanaan proyek ini untuk sementara waktu. Namun, pada akhir 2022, mereka kembali melanjutkannya. Meskipun kontrak belum secara resmi direvisi, kedua negara sepakat pada November 2023 bahwa Indonesia akan menanggung 20% biaya pengembangan, termasuk pembayaran dalam bentuk natura untuk sepertiga bagian. Menurut pemberitaan The Korea Times, tunggakan pembayaran pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun won, atau sekitar Rp11,7 triliun, hingga Oktober 2023. KF-21 dibuat oleh Korea Aerospace Industries (KAI) dan dimaksudkan untuk menggantikan pesawat tempur model lama F-4 dan F-5 buatan AS yang telah menjadi andalan Angkatan Udara Korea Selatan.

Tabel 1– Timeline Proyek Kerja Sama Pesawat Tempur Kf-21/If-X

Tahun	Proses
2009	*Letter of Intent* (LoI) ditandatangani oleh Indonesia dan Korea Selatan
2010	*Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan
2016	Setelah proyek tertunda, *Cost Share Agreement* ditandatangani dan berisi bahwa Korea Selatan menanggung 60%, *Korea Aerospace Industries Co.* (KAI) menanggung 20%, dan Indonesia menanggung 20% dari total biaya produksi
April 2021	Prototipe pesawat tempur KFX/IFX diluncurkan
2022	Penerbangan pertama pesawat tempur KFX/IFX dijadwalkan
2026	Produksi massal pesawat tempur KFX/IFX ditargetkan selesai

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis

KF-21 Boramae memiliki banyak keunggulan, seperti radar AESA yang dikembangkan oleh Hanwha Systems, persenjataan yang sangat presisi, sepuluh point senjata hard point, kemampuan manuver yang tinggi, dan fitur pendukung yang lebih canggih. Dengan daya dorong maksimum 19,95 ton, jet tempur ini dapat mencapai kecepatan maksimum 1.400 mil per jam.

Bentang sayapnya mencapai 11,2 meter dan tingginya 4,7 meter, dengan daya jelajah sejauh 2.870 kilometer. Sebenarnya, proyek pengembangan pesawat tempur buatan Korea Selatan telah diumumkan sejak 2001 oleh Presiden Kim Dae-Jung, namun strategi untuk proyek tersebut baru disetujui pada tahun 2010. Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae telah dimulai sejak tahun 2014 dan ditargetkan selesai dalam 12 tahun, yakni pada 2026. Dalam kesepakatan ini, kedua negara sepakat untuk mengembangkan jet tempur tersebut dalam proyek senilai 8,1 triliun won, setara dengan Rp100 triliun, di mana Indonesia bertanggung jawab untuk membayar 20% dari total biaya. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia sepakat untuk membayar sekitar Rp2 triliun per tahun kepada Korea Selatan.

Tetapi keadaan politik Korea Selatan membuat proyek dan pembayaran tertunda. Indonesia berusaha merundingkan ulang kesepakatan ini pada 2018 untuk meringankan tekanan pada cadangan devisa. Kemudian, pemerintah Indonesia menawarkan skema barter proyek sebagai alternatif untuk pembayaran. Ini termasuk membangun smart city (IKN) dan proyek mobil listrik. KAI KF-21 Boramae (sebelumnya disebut KF-X) adalah program pengembangan jet tempur Korea Selatan yang bekerja sama dengan Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat jet tempur yang dapat melakukan berbagai tugas untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Republik Indonesia.

Jika dibandingkan dengan pesawat generasi ke-4 lainnya, badan pesawat ini memiliki fitur siluman. Namun, tidak ada persenjataan internal seperti pesawat generasi ke-5, meskipun bay internal dapat ditambahkan selama pengembangan. Pemerintah Korea Selatan mengawasi program ini dan berkontribusi sebesar 60% dana yang diberikan. Di mana Indonesia berkontribusi 20% pada tahun 2010, dan mitra swasta termasuk produsen Korea Aerospace Industries (KAI) berkontribusi 20% lainnya. Selain FA/T-50, KAI KF-X adalah proyek jet tempur kedua Korea Selatan.

Purwarupa pertama telah selesai dibuat dan diperkenalkan dalam upacara peluncuran di fasilitas utama KAI di Bandar Udara Sacheon pada April 2021. Dengan nama formal Boramae (Bahasa Korea 보라매, berarti" elang muda" ataupun" elang tempur"). Penciptaan direncanakan dimulai pada tahun 2026, dan uji coba terbang pertama dilakukan pada 19 Juli 2022. Setidaknya 40 pesawat akan dikirim pada tahun 2028, dan Korea Selatan sendiri berharap sebanyak 120 pesawat tiba pada tahun 2032. Selain itu, tersedia untuk pasar ekspor. Di Indonesia, program KF-X sering disebut sebagai program IF-X. Menurut Jakarta Globe, pesawat F-33 Fighting Hawk adalah nama pesawat KF-X yang akan selesai, yang bertujuan untuk mengganti pesawat tempur multi-peran Korea Selatan F-4D/E Phantom dan F-5E/F Tiger. Diumumkan pertama kali oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung, program ini sempat menghadapi keterlambatan dan kendala biaya. Namun, setelah ROKS Cheonan tenggelam pada tahun 2010, perhatian meningkat.

Indonesia bergabung pada 15 Juli 2010 dengan memberikan kontribusi 20% anggaran, bekerja sama dengan Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan teknologi, dan memiliki rencana untuk membeli 50 unit. Dengan 60% biaya ditanggung Korea Selatan dan 20% oleh mitra domestik dan perusahaan seperti Lockheed Martin, KF-X menghadapi masalah teknis dan finansial. Pada 19 Juli 2022, prototipe pertama KF-21 terbang; enam unit uji terbang berlanjut hingga Juni 2023.

Produksi dimulai pada tahun 2024, dan pengiriman direncanakan pada tahun 2026. Beberapa negara seperti Polandia, Filipina, dan Peru berminat dengan KF-21, yang merupakan jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan siluman terbatas yang lebih unggul dari F-16 dan setara dengan Rafale atau Typhoon. Meskipun menghadapi hambatan seperti perubahan desain dan penolakan ekspor teknologi AS, proyek ini tetap berjalan dengan dukungan penuh Korea Selatan.

1. PT Dirgantara Indonesia

PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), yang didirikan pada tahun 2011, secara aktif terlibat dalam proyek pengembangan pesawat tempur multiguna yang didanai oleh Pemerintah Republik Korea. Republik Korea menyumbang 80% dan Republik Indonesia 20% dari program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X.

Yang dirancang dengan karakteristik generasi 4,5, dan diproyeksikan akan dioperasikan oleh kedua negara pada tahun 2020. Pertahanan dan keamanan negara yang kuat akan menjamin kedaulatan, kelangsungan hidup, dan tujuan negara. Kekuatan militer yang tangguh, didukung oleh ketersediaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), diperlukan untuk menciptakan pertahanan dan keamanan yang tangguh. Ketentuan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur kemandirian industri pertahanan.

Tujuan dan fungsi penyelenggaraan industri pertahanan adalah untuk menjamin pemenuhan alat pertahanan dan keamanan secara mandiri. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) adalah pemain utama dalam pembuatan pesawat dan komponen penerbangan, tetapi masih bergantung pada teknologi asing seperti mesin, propeller, avionik, dan material komposit. PT. Dirgantara Indonesia (PT DI) didirikan sebagai LAPIP pada 1961 dan kemudian berubah nama menjadi PT DI pada tahun 2000.

Meski memiliki potensi, seperti pengembangan pesawat N-250, PT DI belum berhasil mencapai produksi massal (Karim, 2020). Industri pertahanan meliputi pembelian, penggunaan, perawatan, hingga produksi, dengan produksi sebagai tingkat tertinggi. Peran pemerintah sangat penting dalam kebijakan pertahanan, kebutuhan alutsista, dan regulasi.

2. Kementerian Pertahanan

Dilaporkan bahwa Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, M. Herindra, mengadakan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di ruang kerja Menko Polhukam di Jakarta pada hari Senin, 17 Oktober.

Pertemuan tersebut dibahas tentang tindak lanjut program KFX/IFX. Sebuah pertemuan tertutup diadakan di mana Wamenhan M. Herindra didampingi oleh beberapa pejabat tinggi, seperti Kabalitbang Kemhan Marsda TNI Julexi Tambayong, Dir Renprogar Ditjen Renhan Kemhan Laksma TNI Supo Dwi Diantara, dan Dir Tekindhan Ditjen Pothan Marsma TNI Wajariman.

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memastikan kelanjutan dan kemajuan program kolaborasi pengembangan pesawat tempur antara Indonesia dan Korea Selatan.

Di Jakarta, pertemuan Working Level Committee ke-6 antara Kementerian Pertahanan RI dan DAPA Korea Selatan diadakan pada 11 November. Pertemuan ini menandai kemajuan besar dalam kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Pejabat tinggi, termasuk Sekjen Kemhan RI dan Menteri DAPA ROK, hadir dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk negosiasi ulang program.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan menyatakan bahwa kerja sama ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian alutsista Indonesia di tengah tantangan teknologi yang kompleks. DAPA ROK menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan bersama selain menjual peralatan.

Menurut UU RI No. 16 Tahun 2012 tentang kemandirian industri pertahanan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bertanggung jawab untuk mengatur penelitian dan pengembangan alutsista. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Strategi Pertahanan Semesta digunakan dalam operasi pertahanan Indonesia.

Gambar 1- Kemhan: KF-21 akan menjadi bagian sistem pertahanan udara Indonesia

Sumber: Airspace Aviation & Defense

3. Implikasi

Diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur KF-21/IF-X adalah langkah strategis penting bagi kedua negara. Proyek KF-21 Boramae, yang dimulai pada tahun 2015, adalah hasil dari perjanjian kedua negara untuk mengembangkan pesawat tempur generasi 4.5, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udara Korea Selatan dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk menanggung 20% dari biaya pengembangan, yang sekitar 8,8 triliun won (sekitar Rp100 triliun).

Komitmen ini menunjukkan investasi Indonesia dalam teknologi pertahanan dan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan yang lebih kuat. Transfer teknologi(ToT) yang akan diperoleh Indonesia merupakan bagian penting dari kolaborasi ini. Diharapkan Indonesia akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam desain, produksi, dan pemeliharaan pesawat tempur melalui proyek ini.

Ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk menciptakan industri pertahanan yang mandiri dan bertahan lama. Dengan membangun komponen seperti sayap dan sistem avionik, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas industri dalam negerinya. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Kemampuan militer saat ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Selain itu, memiliki hubungan yang kuat dengan Korea Selatan, salah satu kekuatan militer terbesar di Asia, dapat memungkinkan lebih banyak kerja sama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Secara keseluruhan, contoh diplomasi pertahanan untuk pembuatan jet tempur KF-21/IF-X menunjukkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan mencakup hal-hal di luar batas militer, termasuk aspek ekonomi dan geopolitik.

1.2. Rumusan Masalah

Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama strategis dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21/IF-X untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

Tujuan kerjasama ini adalah untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik serta meningkatkan kapasitas pertahanan masing-masing negara. Transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan negara, dan peningkatan kemampuan militer adalah semua bagian dari proyek ini.

Penelitian ini fokus pada implikasi diplomasi pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur KF-21/IF-X. Oleh karena itu, latar belakang yang sudah penulis gambarkan di atas tulisan ini akan menekankan mengenai implikasi diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21/IF-X. Proyek KF-21/IF-X yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan adalah contoh nyata diplomasi pertahanan dalam dunia multipolar yang semakin berkembang.

Setelah penjelasan singkat mengenai judul dan tema yang penulis ingin bahas serta komponen sub-bab pendukung, penulis ingin menyampaikan rumusan masalah untuk membantu dalam menganalisis penelitian mengenai "Implikasi Diplomasi Pertahanan Dalam Pengembangan Pesawat Jet Tempur KF-21/IF-X Pada Indonesia Dan Korea Selatan". Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Asia-Pasifik yang semakin berkembang dan menantang ini.

KF-21/IF-X, yang melibatkan Indonesia dan Korea Selatan, adalah contoh nyata dari diplomasi pertahanan yang semakin berkembang di dunia multipolar, yang melibatkan transfer teknologi, pengembangan industri pertahanan domestik, dan peningkatan kemampuan militer kedua negara. Bagi Indonesia, proyek ini merupakan langkah strategis yang akan mempercepat perkembangan industri pertahanan negara dan membuka peluang untuk pengembangan teknologi militer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang diplomasi pertahanan dalam menjaga kekuatan pertahanan regional stabil.

Setelah penjelasan singkat mengenai judul dan tema yang penulis ingin bahas serta komponen sub-bab pendukung di atas, penulis ingin menyampaikan rumusan masalah untuk membantu dalam menganalisis penelitian mengenai "Implikasi Diplomasi Pertahanan Dalam Pengembangan Pesawat Jet Tempur KF-21/IF-X Pada Indonesia Dan Korea Selatan". Dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana implikasi diplomasi pertahanan dalam kerja sama pengembangan jet tempur KF-21/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian harus mempunyai tujuan tertentu yang diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama diplomasi pertahanan yang dilakukan antara Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21/IF-X dan menganalisis dampak dari kerjasama pengembangan pesawat KF-21/IF-X terhadap stabilitas keamanan regional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

1.3.2. Untuk Mengidentifikasi kontribusi proyek KF-21/IF-X terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan udara Indonesia-Korea Selatan dan menilai prospek jangka Panjang dari Kerjasama pertahanan antara Indonesia-Korea Selatan pada KF-21/IF-X

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya terkait kerjasama diplomasi pertahanan dan kontribusinya terhadap stabilitas keamanan regional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Dan juga mengetahui manfaat dari kerjasama kedua negara pada pengembangan jet tempur kf-21/if-x

1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembuat kebijakan, terutama di Indonesia dan Korea Selatan, untuk memahami pentingnya proyek pengembangan jet tempur KF-21/IF-X dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan udara serta memperkuat hubungan jangka panjang antara kedua negara dalam bidang pertahanan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini mudah dipahami oleh para pembaca maka penulis menjelaskan sistematika penulisannya pertanyaan ini dibagi menjadi beberapa bagian yang mudah dipahami ini juga memberikan pemikiran logis tentang gambaran besar dan batasan yang ditetapkan dalam penelitian ini:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang berisi deskripsi permasalahan yang akan diteliti, sejarah dan implikasi nya. Selain itu, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan yang akan dibahas.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi tentang Penelitian Terdahulu, Teori Diplomasi Pertahanan , Teori Kepentingan Nasional, dan Kerangka Pemikiran.

Tinjauan pustaka menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini mencakup teori yang mendukung analisis penelitian, memberikan dasar ilmiah untuk mengkaji diplomasi pertahanan dalam pengembangan jet tempur KF-21/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana penelitian ini akan dianalisis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan. Meliputi: Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Aspek Dimensi Dan Parameter yang relevan di jelaskan untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan terukur.

BAB IV: HASIL

Bab ini berisi analisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, berbagai temuan dari penelitian dipaparkan secara mendalam dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang signifikan serta memulai proses pembahasan. Bab ini berisikan analisa data-data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian kata dari penelitian ini juga terdapat di dalam bagian ini dan untuk mencari hasil serta pembahasan.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berfungsi memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan berlandaskan pada data serta teori yang telah disajikan pada bab sebelumnya, memberikan pemahaman yang jelas dan valid terkait diplomasi pertahanan dalam konteks pengembangan jet tempur KF-21/IF-X. Pada bab ini memberikan jawaban atas dasar dari masalah penelitian yang di bahas secara valid

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan hasil dan kesimpulan serta rekomendasi berdasarkan penelitian yang dipilih. Bab terakhir ini memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan kepada berbagai pihak terkait. Kesimpulan dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan jelas, sedangkan saran diarahkan untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut serta kebijakan yang relevan.